



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 April 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TELEUS TITUS ALI NYARONG
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3. NHK : 483860

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 234.340.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m<sup>2</sup>/180 m<sup>2</sup> di PONTIANAK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 191.340.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m<sup>2</sup>/64 m<sup>2</sup> di PONTIANAK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 187.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
175.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI  
Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 79.375.342**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 500.715.342

**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 500.715.342

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : VERONIKA DERLINA
2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
3. NHK : 628181

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **900.000.000**

1. Tanah Seluas 250 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 285 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 390 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/80 m2 di KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/100 m2 di LANDAK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **109.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, YAMAHA YT 115 SOLO Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **54.300.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **168.000.000**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	403.600.905
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.635.400.905
III. HUTANG	Rp.	215.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.420.400.905

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS SOSIAL  
**SUB UNIT KERJA** : UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IRWAN SUHANDAR  
2. Jabatan : KEPALA UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA  
3. NHK : 548218

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	180.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12629 m <sup>2</sup> /12629 m <sup>2</sup> di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	3.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SOLO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	6.750.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	55.314.000
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	43.678.793
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
Sub Total	Rp.	288.742.793

**III. HUTANG** Rp. 95.792.479

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 192.950.314

---

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**A**

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 25 Nopember 2016 No. 94

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**I. DATA PRIBADI**

- 1. Nama : RUTH EVELINE BATUBARA, S.Sos., M.Si.
- 2. Jabatan : SEKRETARIS - KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
- 3. Alamat Kantor : Jl. ADI SUCIPTO NO. 50, PONTIANAK
- 4. Tanggal Pelaporan : 31 Agustus 2015

**II. DATA HARTA**

**A. HARTA TIDAK BERGERAK ..... Rp. 350.000.000**  
**(TANAH DAN BANGUNAN)**

- 1. Tanah seluas 0 m<sup>2</sup> , di Kabupaten PONTIANAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN, perolehan tahun 2014 NJOP Rp.350.000.000

**B. HARTA BERGERAK**

**a. ALAT TRANSPORTASI ..... Rp. 12.000.000**  
**DAN MESIN LAINNYA**

- 1. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2006, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006 nilai jual Rp.8.000.000
- 2. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 nilai jual Rp.4.000.000

**b. PETERNAKAN, ..... Rp. 0**  
**PERIKANAN,**  
**PERKEBUNAN,**  
**PERTANIAN,**  
**KEHUTANAN,**  
**PERTAMBANGAN DAN**  
**USAHA LAINNYA**

<b>c. HARTA BERGERAK</b>	.....	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
<b>LAINNYA</b>			
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001, dengan nilai jual Rp.0			
2. LOGAM MULIA, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 2010, dengan nilai jual Rp.0			
<b>C. SURAT BERTAGIH</b>	.....	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS</b>	.....	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
<b>LAINNYA</b>			
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai			
2. Yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN dengan nilai			
<b>E. PIUTANG</b>	.....	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL HARTA (II)</b>	.....	<b>Rp.</b>	<b>362.000.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	.....	<b>Rp.</b>	<b>0</b>
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar -			
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )</b>	.....	<b>Rp.</b>	<b>362.000.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis





**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DOMISIUS SINTAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI**
3. NHK : **632565**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **355.000.000**

1. Tanah Seluas 3200 m2 di KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 80.000.000
2. Bangunan Seluas 133 m2 di KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **174.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 G / MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **52.500.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **100.082.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **681.582.000****III. HUTANG** **Rp.** **79.900.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **601.682.000**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.